

Gender Mainstreaming Dalam Peacekeeping Operation PBB di Timor Leste (UNTAET, UNMISET, dan UNOTIL)

Linda Dwi Eriyanti

Dosen HI Universitas Jember

Abstract:

Gender mainstreaming includes all operations in a peacekeeping operation, including disarmament, demobilization and reintegration, rule of law, elections and capacity building of national institutions. UNTAET, United Nations peacekeeping mission in East Timor is the first who have Gender Affairs Unit (GAU), followed by a mission of UNMISET and UNOTIL. GAU address to issues gender mainstreaming in its operations. The most obvious impact of the UN peacekeeping mission on gender relations in Timor Leste is in the cultural promotion of equality. This is reflected in the framework of the Constitution and laws such as the National Development Plan in which construct equality between men and women. Through the ratification of CEDAW, the changes in society can be seen in the last five years in which enlarger involvement of women in the public area, including increased participation of women in the economy, politics and government.

Keywords : *gender mainstreaming, peacekeeping operation*

Abstrak:

Pengarusutamaan gender mencakup semua operasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian, termasuk perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, supremasi hukum, pemilihan umum dan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga nasional. UNTAET, misi penjaga perdamaian PBB di Timor Leste adalah yang pertama yang memiliki Gender Affairs Unit (GAU), diikuti oleh misi UNMISET dan UNOTIL. Tujuan GAU adalah masalah pengarusutamaan gender dalam operasinya. Dampak paling jelas dari misi pemeliharaan perdamaian PBB tentang hubungan gender di Timor Leste adalah dalam promosi budaya kesetaraan. Hal ini tercermin dalam kerangka Konstitusi dan undang-undang seperti Rencana Pembangunan Nasional di mana membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Melalui ratifikasi CEDAW, perubahan dalam masyarakat dapat dilihat dalam lima tahun terakhir di mana pelibatan keterlibatan perempuan di area publik, termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik dan pemerintahan.

Kata Kunci : *pengarusutamaan gender, operasi penjaga perdamaian*

Gender mainstreaming mengacu pada proses untuk menilai dampak bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan termasuk peraturan, kebijakan ataupun program di semua bidang dan di semua tingkatan. Gender mainstreaming adalah strategi untuk membuat kekhawatiran dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi yang integral mulai

dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di bidang politik, ekonomi, dan social, sehingga perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama dan tidak ada lagi ketimpangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan gender (UN Report, 1997).

Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1325 yang diluncurkan pada Oktober 2000, tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, mengakui kebutuhan untuk mengatasi kerentanan khusus perempuan dalam situasi konflik dan kebutuhan untuk memanfaatkan potensi perempuan untuk berkontribusi dalam pembentukan perdamaian dan keamanan (Paula Banerje, 2008). Masyarakat internasional bertanggungjawab untuk melindungi perempuan dan memberikan rekomendasi dengan memperhatikan perspektif perempuan dalam proses untuk membangun perdamaian dan keamanan, mengatasi dampak yang merugikan dari perang terhadap perempuan, memastikan keadilan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender, serta mengenali potensi kepemimpinan perempuan dan membantu mengembangkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan dalam membangun kembali masyarakat pasca konflik (Laura J. Shepperd, 2008).

Resolusi 1325 memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pelaksanaan mandat penjaga perdamaian di tingkat kebijakan dan operasional. Mengingat peran penting yang dimainkan oleh misi penjaga perdamaian dalam meletakkan fondasi bagi masyarakat pasca konflik, gender mainstreaming dalam semua kegiatan operasional (pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, penegakan hukum, pemilihan umum dan pengembangan kapasitas lembaga nasional) sangat penting untuk pelembagaan prinsip persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam rangka rekonstruksi (www.unifem.undp.org).

Sejak penerapan Resolusi 1325, Departemen Operasi Penjaga Perdamaian (DPKO) memperluas kebijakan dan kerangka kerja operasional untuk memastikan perspektif gender secara efektif terintegrasi di semua aktifitas penjaga perdamaian. GAU (Gender Affair Unit) telah dibentuk di semua operasi penjaga perdamaian multidimensional. Peralatan dan sumber daya telah dikembangkan untuk membangun kesadaran dan kepekaan para staf terhadap isu gender (UN Report, 2006)

DPKO di Timor Leste

Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 1246 secara resmi membentuk The United Nations Mission in East Timor (UNAMET) pada tanggal 11 Juni 1999. UNAMET bertugas mengawasi masa transisi pelaksanaan keputusan rakyat Timor Leste. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 diikuti 98% dari pemilih terdaftar dan hasilnya 78,5% memilih untuk merdeka. Namun demikian,

hasil pemilu memicu kekerasan, perusakan fasilitas publik dan penjarahan yang mengakibatkan 200.000 orang mengungsi ke Timur Barat (Charles Scheiner, 2006).

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1277 membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) sebagai penjaga perdamaian multidimensi yang ditugasi untuk mengurus administrasi wilayah dan membangun struktur pemerintahan di masa depan. Setelah Timor-Leste merdeka pada 20 Mei 2002, UNTAET digantikan oleh United Nations Mission of Support in East Timor (UNMISSET), yang memiliki mandat pengembangan kapasitas yang ditujukan untuk meletakkan dasar bagi pemerintahan demokrasi yang berkelanjutan (Elisabeth Porter, 2007).

Mandat UNMISSET berakhir pada Mei 2005 dan digantikan oleh United Nations Office in Timor-Leste (UNOTIL) dijadwalkan untuk mengakhiri mandatnya bulan Mei 2006. Mengingat kondisi politik, kemanusiaan, dan krisis keamanan masih terjadi di Timor Leste, pada Agustus 2006 dibentuk misi baru yakni United Nations Integrated Mission in Timor Leste (UNMIT). Bahkan Tahun ini melalui Resolusi 1912, UNMIT diperpanjang hingga 26 Februari 2011. Salah satu tugas utama pasukan UNMIT adalah melakukan kajian komprehensif terhadap sektor keamanan, pelatihan, dan penguatan Kepolisian Nasional Timor Leste (www.un.org).

Relasi Gender di Timor Leste

Lebih dari 80% dari total 923,198 penduduk Timor Leste tergantung pada ekonomi subsisten pedesaan. Mereka terdiri dari 12 kelompok etnis yang mayoritas menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Perempuan sangat jarang menjalankan kekuasaan dalam struktur tradisional. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di sektor public sangat terbatas, karena perempuan mendapatkan peran di rumah tangga. Angka buta huruf perempuan masih tinggi, demikian pula angka kematian ibu yang melahirkan karena terbatasnya akses untuk perempuan (Tais Timor, 2000).

Organisasi Populer Perempuan Timor (OPMT) dibentuk untuk melibatkan perempuan dalam perang melawan kolonialisme dan diskriminasi terhadap perempuan Timor Leste. Pada masa perlawanan terhadap Indonesia, mereka menanam sayur untuk makan keluarga mereka dan para pejuang kemerdekaan; menyembunyikan pejuang di rumah mereka; merawat yang sakit dan terluka, dan memberikan makanan selama pertemuan rahasia Falintil. Selain itu, perempuan mempertaruhkan hidup mereka dengan memberikan informasi dengan menjadi mata-mata, obat-obatan dan amunisi untuk pejuang kemerdekaan dan berjuang bersama mereka. Brigade bersenjata perempuan dan unit di bawah komando perempuan dibentuk di beberapa bagian wilayah.

OPMT dan Organisasi Perempuan Timor (OMT), memberi dukungan dan melindungi para janda, anak-anak dan korban perkosaan, menyarankan perempuan dan gadis-gadis bagaimana melindungi diri dari militer Indonesia dan dimana mereka harus mencari dukungan (www.etan.org).

Meskipun perempuan berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan, namun kontribusi mereka belum cukup diakui. Meskipun foto-foto sejarah memberikan bukti keikutsertaan perempuan dalam pertempuran, tidak seorang wanita pun yang terdaftar di antara 37.472 orang yang terdaftar sebagai mantan kombatan FALINTIL dalam laporan kepada presiden pada tahun 2003. Dengan demikian perempuan tidak mendapat pembayaran jaminan sosial dan bantuan ekonomi lainnya yang akan dibuat untuk mantan kombatan maupun dari pengakuan sosial yang diakui sebagai veteran perjuangan bersenjata. Sedangkan melalui Komisi Kader Perlawanan didirikan pada bulan September 2004 yang mendaftarkan mantan anggota perlawanan sipil, termasuk kader sipil (*Quadros civis*), dan tahanan politik hanya 30% dari 39.000 orang terdaftar adalah perempuan (Cristalis dan Scott, 2005).

Pada masa pendudukan Indonesia, diperkirakan puluhan ribu perempuan Timor Leste menjadi korban perkosaan penyiksaan, bahkan pembunuhan. Perempuan yang dicurigai aktif dalam perlawanan atau kerabat pejuang kemerdekaan disiksa, dianiaya dan dalam beberapa kasus dibunuh dalam interogasi oleh tentara Indonesia. Banyak anak perempuan yang dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual, dan sejumlah perempuan harus membesarkan anak-anak lahir sebagai akibat perkosaan. Selain itu, pernikahan paksa merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan dengan memaksa gadis-gadis muda hidup dengan tentara Indonesia untuk mencegah balas dendam terhadap keluarga mereka. Pada tahun 1982, di Timor Leste juga terdapat dua bangunan di Baucau dekat barak militer yang digunakan untuk menempatkan perempuan-perempuan untuk melayani kebutuhan seks TNI (www.pecsekretariat.multiply.com).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah besar masyarakat di Timor Leste. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering menerima sedikit atau tidak ada sanksi (biasanya denda oleh *lian nain*) dan korban didorong untuk melanjutkan kehidupan mereka bersama untuk menjaga keutuhan keluarga dan sistem kekerabatan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2002 melaporkan bahwa 51% wanita berkonsultasi merasa tidak aman dengan pasangannya. Selama tahun 2005, 492 kasus kekerasan domestik dilaporkan ke polisi dan mayoritas dari mereka berasal dari Dili, dan hanya 118 dari kasus mereka yang ditangani kejaksaan. Kekerasan berbasis gender yang terjadi berupa perkosaan, trafficking untuk prostitusi, dan penyerangan seksual lainnya (Tais Timor, 2000).

Mandat UNTAET, UNMISSET, dan UNOTIL

UNTAET melaksanakan multidimensional PKO yang mandatnya meliputi :

1. melaksanakan semua otoritas legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi peradilan;
2. memberikan keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban;
3. mendirikan administrasi yang efektif;
4. membantu dalam pengembangan layanan sipil dan sosial;
5. memastikan koordinasi dan pengiriman kemanusiaan, rehabilitasi dan pengembangan bantuan;
6. mendukung peningkatan kapasitas untuk memerintah diri sendiri; dan
7. membantu dalam pembentukan kondisi untuk berkelanjutan development (Ospina, 2006).

Program UNTAET difokuskan untuk pembentukan struktur administrasi untuk melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan dasar, bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi untuk memastikan layanan darurat (air, tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan), serta mengawasi kembalinya pengungsi dan rehabilitasi dukungan masyarakat. Komponen UNTAET terdiri dari 9.000 personel sipil, 17 tentara dan 200 pengamat militer (Charles Scheiner, 2006).

Mandat UNMISSET yang mulai bertugas tahun 2002 adalah untuk mendampingi pemerintah Timor Leste dalam langkah pertama sebagai sebuah negara independen dan membantu pihak berwenang di bidang-bidang utama pembangunan seperti: struktur administrasi yang penting bagi kelangsungan hidup dan stabilitas politik Timor Timur; penegakan hukum sementara, keamanan publik dan mengembangkan Layanan Kepolisian Timor Leste (Dinas Kepolisian), serta pemeliharaan keamanan eksternal dan internal dengan kontingen pasukan perdamaian (www.un.org).

Pada tanggal 14 Mei 2004, Dewan Keamanan, melalui resolusi 1543, memperpanjang mandat UNMISSET untuk jangka waktu enam bulan. Dalam perpanjangan mandate ini terjadi pengurangan besarnya misi dan merevisi tugasnya, yakni mencakup unsur-unsur berikut:

- dukungan bagi administrasi publik dan sistem peradilan Timor Leste dan keadilan di bidang kejahatan serius;
 - dukungan bagi perkembangan penegakan hukum di Timor Leste;
 - dukungan untuk keamanan dan stabilitas di Timor Leste (www.un.org).
- Pada tanggal 16 November 2004, Dewan Keamanan, dengan resolusi 1573 memperpanjang mandate UNMISSET untuk enam bulan berikutnya dengan misi dan tugas yang sama.

Pada bulan Mei 2005, UNMISET berhasil menyelesaikan mandatnya dan digantikan UNOTIL, yang dipimpin oleh Departemen Urusan Politik (DPA) dan dikelola oleh Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. UNOTIL menyediakan 45 penasehat sipil, 40 penasehat polisi, dan 35 penasihat tambahan untuk Unit Patroli Perbatasan, juga 10 pejabat untuk memberikan pelatihan dengan memperhatikan tata pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia. UNOTIL memiliki mandat satu tahun untuk mengkonsolidasikan transfer keterampilan dan pengetahuan lembaga-lembaga negara dan pengembangan kerjasama. Tujuan mandat ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan kerangka pembangunan berkelanjutan di Timor Leste (www.un.org).

Gender Mainstreaming dalam UNTAET, UNMISET, dan UNOTIL

Gender Mainstreaming dalam UNTAET

UNTAET adalah misi penjaga perdamaian PBB pertama yang memiliki Gender Affairs Unit (GAU) untuk menangani isu-isu gender dalam operasinya. Didirikan pada bulan April 2000, GAU ini ditempatkan di Kantor Perwakilan SRSG yang bertanggung jawab atas Misi Pemerintahan dan Administrasi Publik. GAU dipimpin oleh seorang ahli gender senior dengan empat staf internasional dengan keahlian gender dan kompetensi di bidang substantif lainnya. GAU bekerja dalam kerangka CEDAW, BPFA 1995, dan ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2 dan the Secretary-General's Directive tentang gender mainstreaming dalam sistem PBB (UNIFEM, 2004).

Mandat GAU adalah gender mainstreaming di seluruh wilayah fungsional UNTAET dan untuk memastikan partisipasi penuh dari perempuan dan laki-laki Timor Leste dalam pengambilan keputusan dan sebagai penerima manfaat pembangunan termasuk akses ke sumber daya. Pada awalnya GAU mengembangkan kemitraan yang kuat dengan REDE (Jaringan dalam bahasa Portugis - sebuah organisasi yang menyatukan kelompok-kelompok perempuan) untuk mempromosikan Platform untuk Aksi yang diadopsi oleh 500 perempuan selama Kongres Pertama Perempuan Timor Loro'sae pada bulan Juni 2000. Setelah advokasi REDE, SRSG mendesak semua departemen UNTAET untuk melaksanakan rekomendasi dari Platform, khususnya, untuk kuota perempuan 30% dalam semua badan pemerintahan dan pelayanan publik. GAU mengembangkan rencana kerja berdasarkan Platform dan berkonsultasi secara teratur dengan REDE sebagai mitra utama (DPKO, 2001).

Mekanisme yang digunakan untuk pengarusutamaan gender di seluruh bidang fungsional UNTAET adalah:

1. memasukkan Gender sebagai piont penting dalam setiap bagian program dan membentuk gugus tugas untuk memfasilitasi penggabungan masalah jender dalam pekerjaan mereka.

2. Gugus tugas khusus dan kelompok kerja untuk menangani isu-isu gender dalam kaitannya dengan legislasi, peradilan, hak asasi manusia, kejahatan serius, layanan sipil, proses pemilu dan konstitusional, serta untuk menangani kekerasan berbasis gender.
3. Jaringan kabupaten menggunakan poin penting gender untuk meningkatkan kesadaran gender dengan kolega PBB dan CSO di tingkat kabupaten dan kecamatan (Rehn dan Sirleaf, 2002).

Fungsi pokok GAU adalah peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran, pengumpulan data dan analisis gender, legislasi dan analisis kebijakan, pembuatan jaringan, serta penyebaran informasi dan penyelenggaraan acara khusus. Karena ini adalah pertama kalinya isu gender diintegrasikan ke dalam misi penjaga perdamaian, maka salah satu prioritas utamanya adalah untuk melakukan peningkatan kesadaran di antara semua staf militer dan sipil PBB untuk mempromosikan kesetaraan jender sebagai tanggung jawab kolektif (UNTAET Report, 2001).

Sesi khusus untuk peningkatan kesadaran gender diselenggarakan setiap dua minggu dan merupakan bagian dari program wajib induksi dua hari untuk semua staf yang baru bergabung dengan misi. Pelatihan pasukan penjaga perdamaian, polisi sipil dan para perwira polisi nasional dilakukan secara teratur untuk memunculkan kepekaan mereka terhadap isu-isu gender (Rehn dan Sirleaf, 2002).

Lokakarya Triwulanan sensitifitas gender diselenggarakan di Dili dengan jaringan gender kabupaten, staf UNTAET, badan-badan PBB dan CSO. Lokakarya serupa juga diselenggarakan di tingkat kabupaten. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan analisis gender untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang akan ditangani oleh bidang fungsional. Peninjauan legislasi dan analisis hukum dimaksudkan untuk memastikan setiap bagian undang-undang baru itu sensitive gender dan memunculkan kesetaraan dalam hukum (Rehn dan Sirleaf, 2002).

Informasi kegiatan dan acara khusus bertujuan untuk menginformasikan program UNTAET kepada masyarakat umum tentang perkembangan terakhir ataupun permasalahan yang muncul. GAU menerbitkan majalah bulanan "Gender News" yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, Bahasa dan Portugis, yang didistribusikan secara luas ke distrik-distrik dan LSM / CSO. Sedangkan Acara khusus diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dan kampanye Enam Belas Hari Aktivisme melawan Kekerasan Berbasis Gender (Rehn dan Sirleaf, 2002).

Bidang fungsional UNTAET yang berdasarkan mandat mereka bekerja terkait dengan GAU dalam pengarusutamaan gender adalah: PKF, Polisi Sipil, Kantor Kepala Penasihat Hukum, Departemen Kehakiman, Unit Kejahatan Berat, Unit Hak Asasi Manusia, Kantor Komunikasi dan Informasi Publik, Layanan Sipil dan Pekerjaan Umum, serta Unit Pelatihan dan Bahasa (Rehn dan Sirleaf, 2002).

Pada bulan Juli 2000, pilar Pemerintahan dan Administrasi Publik berubah menjadi East Timor Transitional Administration (ETTA) dan GAU dipindahkan ke National Planning and Development Agency (NPDA) di ETTA. Sebagai kepala NPDA adalah *ex-officio* anggota Kabinet, GAU berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempengaruhi pengembangan kebijakan dan upaya gender mainstreaming dalam proses 'Timorisasi', mengarah kepada pemerintahan independen. Upaya GAU terfokus pada struktur pemerintah yang memwadahi kepentingan dan partisipasi perempuan. Pengenalan kebijakan affirmative action menghasilkan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Legislatif Nasional, juga di pejabat sipil nasional lainnya (Ospina, 2006).

Langkah pertama peningkatan kesetaraan selama periode masa transisi adalah promosi perempuan dalam proses politik, pemilu dan konstitusional. Komisi Independen Pemilu mengembangkan kebijakan gender bagi kegiatan mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik tidak hanya sebagai kandidat dan pemilih, tetapi juga sebagai komisaris pemilu, petugas TPS dan pengamat pemilu. Menyusul penolakan oleh Dewan Legislatif Nasional masalah kuota perempuan 30% dalam peraturan untuk pemilihan Majelis Konstituante, SRSK meminta GAU untuk mengorganisasi pelatihan kepemimpinan politik untuk kandidat perempuan yang potensial. Enam workshop dihadiri oleh 145 perempuan dari semua kabupaten dilaksanakan dalam kemitraan dengan UNIFEM. Tim Kampanye pendidikan kewarganegaraan dibentuk, 40% terdiri dari perempuan. Komisi Konstitusi, yang juga melibatkan 40% perempuan di akar rumput untuk menghadiri audiensi publik termasuk sidang khusus untuk perempuan (Ospina, 2006).

Pemilu yang dilakukan pada 30 Agustus 2001 menghasilkan Dewan Konstituante dengan perempuan 27%. Pada tanggal 15 September 2001, Administrasi Transisi Kedua didirikan dan dikenal sebagai Timor Leste Administrasi Publik, sebuah model yang akan membentuk pemerintahan independen yang baru. GAU berhasil melobi untuk memiliki Gerakan Nasional untuk perempuan yang menduduki kepala kantor kementerian (Ospina, 2006).

Secara paralel kelompok kerja Gender dan Konstitusi yang terdiri dari kelompok-kelompok perempuan melobi partai politik dan anggota Majelis Konstituante untuk melahirkan konstitusi. Sebuah "Piagam Hak Perempuan" dengan 10 poin kunci yang didukung oleh 7.500 tanda tangan didiskusikan

dengan SRSG dan diajukan kepada Majelis Konstituante. Pada 22 Maret 2002, Konstitusi Timor Leste telah diadopsi dengan klausul kesetaraan dan penggabungan tujuh dari 10 pasal Piagam Perempuan (Ospina, 2006).

Gender Mainstreaming dalam UNMISSET

Dengan kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20, Mei 2002 UNMISSET yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1410 memasuki Timor Timur dengan mandat pembangunan perdamaian yang fokus pada upaya membantu struktur administrasi, pemeliharaan hukum dan ketertiban, dan keamanan di seluruh wilayah. Sebuah unit gender, dikelola oleh satu penasihat gender, didirikan untuk melanjutkan pekerjaan gender mainstreaming dalam misi fungsional terintegrasi dengan sistem PBB.

GAU ditempatkan di kantor SRSG. Penasihat gender bekerja sama dengan Koordinator Kantor Residen PBB dan dengan tugas mengintegrasikan point penting Gender di Misi PKF, Polisi Sipil PBB, Kantor Kabupaten Administrasi, Unit Hak Asasi Manusia dan Kantor Informasi Publik. Mayoritas kegiatannya berhubungan dengan Kantor Promosi Kesetaraan (OPE, dimana kepala GAU menjadi penasehatnya) dan CSO perempuan terutama dalam kaitan dengan promosi CEDAW, kampanye nasional tentang kekerasan domestik dan mendukung Unit Kepolisian Nasional yang melindungi kelompok rentan. Penasihat gender berperan penting dalam pembentukan PBB Consultative Group on Gender dan anggota Kelompok Kerja Perdagangan (UNIFEM, 2005).

Salah satu kegiatan penting terkait gender yang dilakukan penasehat gender adalah melakukan kampanye intensif peningkatan kapasitas yang ditujukan kepada anggota militer dan sipil dalam UNMISSET. Sebuah modul kebijakan dan prosedur PBB terkait eksploitasi seksual dan pelecehan dikembangkan dan sesi briefing diadakan untuk semua staf internasional dan lokal. Modul pelatihan analisis jender yang dikembangkan, dijadikan pedoman bagi Petugas Nasional Hak Asasi Manusia, Gender Focal Point UNMISSET dan Penasehat Kelompok Dukungan Sipil (UNIFEM, 2005).

Penasihat gender bekerja sama dengan tim Negara-negara PBB, UNDP dan PBB Consultative Group on Gender memberikan pelatihan analisis gender dan gender mainstreaming serta menyiapkan transfer program gender kepada agen-agen PBB. Penasehat Gender memastikan penerbitan Gender Briefing Kit yang memetakan penerapan gender di Timor Leste dan didistribusikan secara luas. Penasihat gender mengembangkan hubungan dengan lembaga donor untuk mendapatkan dukungan bagi proses gender mainstreaming dalam Kepolisian Nasional dan Sektor Kehakiman.

Gender Mainstreaming dalam UNOTIL

Tahun pertama mandat UNOTIL, aspek utama pekerjaan GAU difokuskan pada penyediaan dukungan teknis kepada Tim Negara-negara PBB. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada, GAU mengembangkan pelatihan gender dalam menyusun program dan Gender Briefing Kit untuk sistem PBB di Timor Leste. Briefing Kit memberikan ikhtisar secara rinci terkait dengan gender dan memberikan profil gerakan perempuan di Timor-Leste. Briefing Kit juga telah diterjemahkan ke dalam Tetum (bahasa daerah Timor-Leste) untuk memudahkan akses dan penggunaan di tingkat nasional.

Program pelatihan gender disampaikan pada berbagai pelatihan, diantaranya bagi Kelompok Penasihat Sipil (kelompok dari 50 penasihat ditempatkan dalam pelayanan pemerintah Timor-Leste), Unit Hak Asasi Manusia dan Jaringan Gender UNOTIL (UNIFEM, 2005).

GAU UNOTIL memberi perhatian khusus terhadap upaya pencegahan penularan HIV / AIDS di Timor Leste. GAU berupaya mendorong adanya kebijakan dialog antara Sistem PBB dengan Instansi dan Departemen Kesehatan terkait dengan masalah tersebut penanggulangan dan pencegahan penularan HIV/AIDS di Timor Leste (Ospina, 2006).

Kantor Penasihat Gender dalam UNMISET berperan penting dalam memulai tugas PBB bersama untuk mendukung tugas Kantor Promosi Kesetaraan dalam penyusunan Undang-undang Hukum Kekerasan Domestik. Penasehat Gender UNOTIL melanjutkan program itu dengan terus memantau perubahan Undang-undang tersebut sampai pada kesepakatan akhir yang diajukan pada bulan Januari 2006. Kekerasan terhadap perempuan juga diprioritaskan melalui dukungan yang berkelanjutan dari Kelompok Tema Gender PBB untuk Kantor Promosi Kesetaraan, yang saat ini diketuai oleh UNFPA (Ospina, 2006).

Fungsi Penasihat Gender juga termasuk peningkatan kesadaran tentang pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, dan sebagai hasilnya serangkaian sesi briefing yang ditargetkan untuk semua komponen misi. UNOTIL difasilitasi dengan UNIFEM, menyelenggarakan serangkaian konsultasi terkait draft kebijakan untuk membantu korban kekerasan berbasis gender. Selanjutnya, GAU UNOTIL mengembangkan modul pelatihan kekerasan berbasis jender dan eksploitasi seksual untuk staf UNICEF. UNOTIL melaksanakan proyek pendidikan kewarganegaraan bagi perlindungan hak-hak perempuan di tingkat kabupaten sebagai kolaborasi bersama antara Kantor Promosi Kesetaraan dan Departemen Kehakiman. Hal ini didukung dengan dana dan fasilitas dari Markas DPKO (Ospina, 2006).

Dampak Gender Mainstreaming UNTAET, UNMISSET, dan UNOTIL terhadap Relasi gender di Timor Leste

Dampak paling nyata dari Misi PBB pada hubungan gender di Timor Leste adalah dalam promosi budaya kesetaraan. Hal ini tercermin dalam kerangka hukum seperti Konstitusi dan Rencana Pembangunan Nasional di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditetapkan. Dan melalui ratifikasi CEDAW, perubahan dalam masyarakat bisa dilihat dalam lima tahun terakhir dimana keterlibatan perempuan di arena publik lebih besar, diantaranya peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik dan pemerintahan (www.un.org). Perubahan ini banyak terlihat di wilayah perkotaan. Para pejabat pemerintah, LSM, anggota parlemen dan warga negara biasa yang terlibat dalam evaluasi misi perdamaian di Timor Leste ini mengakui bahwa misi perdamaian PBB memiliki dampak positif terhadap hubungan gender di Timor Leste. UNTAET berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memerangi kekerasan domestik. Peran GAU dan komitmen dari SRSG UNTAET, Sergio Vieira de Mello, dalam mendukung gerakan perempuan dan hak-hak perempuan, disebut sebagai salah satu keberhasilan misi di Timor Leste (OHCHR, 2006).

Prestasi besar UNTAET pada masa pemerintahan transisi Timor Leste adalah pembentukan Dinas Promosi Kesetaraan yakni Gerakan Nasional Perempuan dan pembentukan Unit Perlindungan Kelompok Rentan oleh Polisi Sipil PBB untuk menangani masalah kekerasan domestik yang telah menjangkau 13 kabupaten di Timor Leste (OHCHR, 2006).

Saat ini prosentase perempuan Parlemen Nasional mencapai 26%, tiga perempuan menjadi pemimpin partai dan dua perempuan memimpin komisi parlemen. Pada tahun 2005, 34 perempuan juga terpilih sebagai kepala desa/dusun, yang sebelumnya menjadi monopoli laki-laki. Melalui affirmative action, lebih dari 1.000 perempuan terpilih sebagai anggota Dewan Desa. Perempuan yang menjadi menteri 3 orang, wakil menteri dan pejabat pemerintah 4 orang. Beberapa perempuan memegang posisi penting di Departemen Administrasi Negara, Kementerian Perencanaan dan Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan dua perempuan menjadi untuk Perdana Menteri (OHCHR, 2006).

Judicial System Monitoring Programme (JSMP), NGO Nasional yang bergerak di bidang kegiatan pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang sistem judicial menyatakan bahwa perempuan sudah turut berperan serta di dalam sistem peradilan formal, hal ini dapat dilihat dari komposisi para hakim, jaksa, pengacara dan polisi dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan sistem judicial di Timor-Leste. Data statistik yang diperoleh dari Departemen SDM PNTL secara nasional, menunjukkan bahwa :

- Total Polisi perempuan dalam institusi PNTL berjumlah 569 orang;(sekitar 20 % dari jumlah keseluruhan) diantaranya ada yang menduduki posisi sebagai Inspektur Polisi, sub-Inspektur Polisi, Agentes Polisi.
- Selain itu posisi perempuan dalam Departemen Kepolisian menduduki jabatan sebagai : Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, Wakil Direktur Administrasi dan perencanaan, Wakil Komandan Distrik, Wakil bagian Investigasi criminal dan Kepala administrasi di semua Unit di setiap distrik di dominasi perempuan. Selain itu juga salah seorang perempuan dalam Institusi PNTL juga mendapat kesempatan untuk turut terlibat dalam misi perdamaian dunia di negara lain.
- Dari 10 hakim yang aktif sekarang, ada lima perempuan (dua hakim nasional dan tiga hakim internasional)
- Dari 6 pengacara publik, dua adalah perempuan (hakim internasional)
- Dari 61 pengacara pribadi, 14 adalah perempuan
- Saat ini di Judicial Training Center sekitar 27 orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi hakim, jaksa dan pengacara publik. Dari jumlah 27 orang peserta training tersebut diantaranya terdiri dari 9 orang peserta perempuan. Dan
- Saat ini juga Judicial Training Center sedang mempersiapkan 15 orang peserta untuk memasuki tahap pertama penyeleksian untuk menjadi calon hakim, jaksa dan pengacara publik. Dari 15 peserta tersebut terdapat 4 orang peserta perempuan (www.jsmp.minihub.org).

Banyak LSM dan CSO bekerja untuk kesetaraan gender merupakan hasil dari pelatihan yang dilakukan UNTAET tahun 2001, dan mampu menghasilkan perempuan-perempuan yang berpotensi untuk menjadi pemimpin politik. Sejak saat itu LSM telah berkembang dan terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pada tingkat lokal dan nasional dengan menggunakan pendekatan dan alat yang dikembangkan dalam pelatihan tahun 2001 (www.jsmp.minihub.org).

UNTAET dan UNMISSET juga membuka lapangan kerja bagi perempuan maupun laki-laki. UNTAET adalah perusahaan terbesar di sektor formal, 25% dari karyawannya adalah perempuan. Kehadiran PBB juga mendorong sektor jasa di mana banyak perempuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan di restoran dan hotel, sedangkan pria dipekerjakan sebagai penjaga keamanan (www.jsmp.minihub.org).

Dampak negatif dari adanya pasukan perdamaian PBB di Timor Leste yang dilaporkan diantaranya terkait dengan kasus pelecehan seksual oleh personil PBB, peningkatan pelacuran, banyak anak yang lahir dari hubungan personil pasukan perdamaian dengan perempuan setempat yang kemudian ditinggalkan setelah misi selesai. Kaum tradisional berpendapat bahwa

program PBB dan pendukungnya terkait nilai-nilai demokrasi, termasuk hak-hak yang sama untuk pria dan wanita, telah merusak nilai-nilai tradisional masyarakat Timor, yang mengarah ke dekadensi moral.

Kesimpulan

Gender mainstreaming dalam Peacekeeping Operation PBB diharapkan lebih bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di wilayah konflik baik laki-laki maupun perempuan sehingga partisipasi dari keduanya memungkinkan berkontribusi positif bagi pencapaian perdamaian.

Gender mainstreaming Peacekeeping Operation yang dilaksanakan UNTAET, UNMISSET, dan UNOTIL di Timor Leste dinilai berhasil membawa dampak positif bagi kehidupan perempuan disana. Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka partisipasi perempuan di sektor publik baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan masyarakat, terlihat dengan banyaknya LSM, terutama LSM perempuan yang berkembang dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik di Timor Leste.

Namun demikian secara keseluruhan belum bisa dikatakan berhasil mengingat hingga saat ini peace dalam arti negative peace maupun positif peace belum bisa terwujud. Kekerasan secara sporadis masih terjadi dimana-mana, sistem perekonomian juga belum stabil, demikian pula dengan tingkat kehidupan masyarakatnya yang belum juga membaik. Belum lagi ditambah dampak negatif yang muncul justru karena keberadaan pasukan peace operation PBB di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Banerjee, Paula, eds. 2008. *Women in Peace Politics*. SAGE Publications Inc: USA.
- Cristalis dan Scott. 2005. *Independent Women: The Story of Women's Activism in East Timor*. Progressio: UK
- DPKO. 2006. *Gender Mainstreaming in Peacekeeping Operation*. Progress Report UN DPKO PBB: New York.
- DPKO. 2001. *Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peace Operations*. Lessons Learned Unit DPKO: New York.
- Ospina, Sofi. 2006. *A Review and Evaluations of UN Peacekeeping Operations in Timor Leste*. UN DPKO: USA.
- Porter, Elisabeth. 2007. *Peace Building Women in International Perspective*. Routledge: New York.
- Rehn, Elisabeth and Ellen Johnson Sirleaf. 2002. *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*. UNIFEM: New York
- Scheiner, Charles. 2006. *Penentuan Nasib Sendiri Bukan Sekedar Merdeka Secara Politis*. Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis: Dili.
- Shepherd, Laura J. 2008. *Gender, Violence & Security*. Zed Books Ltd. Palgrave Mcmillan: New York.
- Tais Timor, Vol 1 No 2, 28 Februari 2000.
- Tais Timor, Vol I No 4, 27 Maret 2000
- UNIFEM. 2005. *Securing the Peace, Guiding the International Community Towards Women's Effective Participation Throughout peace Processes*. UNIFEM: New York.
- UNIFEM. 2004. *Women, Peace and Security: UNIFEM Supporting Implementation of Security Council Resolution 1325*, UNIFEM: New York.
- UNTAET. 2001. *UNTAET Report to DPKO on the Implementation of Security Council Resolution 1325*, 25 May 2001.

Situs Internet

- <http://www.pecsekretariat.multiply.com>, diakses tanggal 13 juni 2010
- <http://www.ohchr.org/english/docs/ColReport-English.pdf>, diakses tanggal 15 Juni 2010
- <http://kulitmanggis.multiply.com/journal/item/30/timorleste>, diakses tanggal 9 Juni 2010
- <http://www.etan.org/lh>, diakses tanggal 9 Juni 2010
- <http://www.jsmp.minihub.org>, diakses tanggal 9 Juni 2010
- <http://www.laohamutuk.org>, diakses tanggal 13 Juni 2010
- <http://www.un.org/Depts/dpko/intro.htm>, diakses tanggal 13 Juni 2010
- <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmit/index.html>, diakses tanggal 15 Juni 2010

<http://www.un.org/peace/etimor/UNMISSET>, diakses tanggal 15 Juni 2010

<http://www.un.org/peace/etimor99/etimor.htm&prev=/search?>, diakses
tanggal 15 Juni 2010

<http://www.unifem.undp.org>, diakses tanggal 9 Juni 2010